

SKRIPSI

KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI

(Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengah Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi)

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana



OLEH

ALKINDI

NIM: 10775000135

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012**

KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI
(Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan KuantanTengah Dengan Kecamatan
Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi)

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konflik Batas Wilayah yang mana kajian ini mengkhususkan pada konflik politik tapal batas di Kabupaten Kuantan Singingi, sehubungan dengan diluncurkannya semangat otonomi daerah. Sebagai manifestasi terwujudnya desentralisasi yang dilimpahkannya sebagian wewenang pusat kepada daerah.

Kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik kewenangan lainnya. Walaupun belum banyak hasil penelitian mengenai kerjasama antar daerah tersebut, namun berikut ini akan dikemukakan beberapa studi yang terkait dengan masalah itu. misalnya telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menandai buruknya pembagian kewenangan antar pusat – Provinsi – Kabupaten/Kota di Indonesia. Disamping itu kuatnya nuansa penyeragaman (*uniformitas*) kebijakan Pusat terhadap heterogenitas daerah yang banyak menimbulkan konflik di tingkat lokal. Masalah tersebut muncul karena adanya beberapa kelemahan fatal UU No.22/99 tentang Pemerintahan Daerah (yang saat ini tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU No.32/2004 pada bulan Oktober 2005).

Temuan penelitian ini adalah *Pertama*, lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan diantara tingkat pemerintahan baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. *Kedua*, konflik kewenangan antar tingkat pemerintahan pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, terutama Kabupaten/Kota. *Ketiga*, konflik penyelenggaraan fungsi pemerintahan terutama oleh Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat departemen yang menangani bidang sektoral. *Keempat*, konflik tersebut juga terjadi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan perusahaan/swasta. *Kelima*, dalam pengelolaan sumber daya alam, daerah merasa lebih berhak, dan memiliki wewenang sendiri. *Keenam*, masalah konflik batas wilayah ini, penulis menemukan adanya temuan berperan pentingnya ekonomi-politik. Disamping konflik sumber daya alam (SDA), yang di latarbelakangi oleh kepentingan politik elit dan oknum yang memanfaatkan keuntungan dari konflik batas wilayah ini.

Kata Kunci : Konflik Politik, Konflik Batas Wilayah, Tapal Batas dan otonomi Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri dengan Judul **"KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI (*Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengah Dengan Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi*)"**

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan teliti dan cermat, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan ilmu dan sarana yang dimiliki penulis. Tetapi hal ini tentunya bukan kesengajaan dari penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Agus Kos, S.Pdi dan Ibunda Hesmi Warni tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat baik secara langsung maupun tersirat untuk penyelesaian studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Nazir, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Almasri, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec. Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Mashuri, MA. selaku pembimbing dua yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmunya selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar.
9. Bupati Kuantan Singingi beserta Staf yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi beserta Staf yang telah memberikan bantuan berupa data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
11. Ninik Mamak Kenegerian Benai dan Kenegerian Kopah yang memberikan data dan informasi dari penulisan skripsi ini.
12. Kepala Desa Kenegerian Benai dan Kepala Desa Kenegerian Kopah, yang memberikan data dan informasi dari penulisan skripsi ini.
13. Kakanda Heni Dewi Susanti, Amd, Kakanda Hilda Wiryanti, S.Sos, Kakanda Alfarabi, SE, yang telah memberikan masukan untuk penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku yang selalu ada saat aku senang maupun susah, Uda Taufik, Ocu Roki, Moyo, Pepi Deco, Doni Asid, Charles Sasmito, S.Sos, Involla, Zikri Rahman, Fikiri dan banyak lagi yang maaf jika namanya tidak tertulis dalam lampiran ini, spesial diberikan kepada seseorang yang menjadi motivasi dalam hidup penulis Helmi Susanti.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.....!!!

Pekanbaru, November 2011
Penulis

ALKINDI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SKIRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	10
BAB II. KERANGKA TEORITIK	11
2.1. Otonomi Daerah	12
2.2.Kecamatan.....	15
2.3.Konflik	18
2.4.Kerangka Pemikiran.....	27
2.5.Konsep Operasional	27
2.6.Operasional Variabel	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	30
1.1.Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	30
1.2.Jenis Penelitian.....	30
1.3. Sumber Data.....	30
1.4.Populasi Dan Sampel	30
1.5.Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.6. Teknik Analisa Data	33
BAB IV. LOKASI PENELITIAN	34
4.1.Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	34

4.2.Kondisi Geografi, Tofografi, Hidrologi, Klimatologi	35
4.3.Komposisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	37
4.4.Tenaga Kerja	38
4.5.Keadaan Pemerintahan	38

BAB V PEMBAHASAN

42

5.1.Gambaran Umum Perjalanan Konflik Kabupaten Kuantan Singingi	42
5.2.Faktor Konflik Tapal Batas Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
5.3.Implikasi Konflik Batas Wilayah Terhadap Pemerintah dan Masyarakat.....	67

BAB VI PENUTUP

72

6.1.Kesimpulan	72
6.2.Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011	37
2. Nama Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011	39
3. Nama Badan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011	40
4. Nama-nama Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2000-2011	40
5. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan atau Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006	40
6. Tanggapan responden tentang penyebab terjadinya faktor-faktor konflik karena tapal batas.....	49
7. Tanggapan responden terhadap penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena faktor legitimasi.....	50
8. Tanggapan responden terhadap penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena faktor ekonomi.....	53
9. Tanggapan responden terhadap penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena faktor politik.....	55
10. Tanggapan responden terhadap penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena faktor adat.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan implikasi kepada daerah untuk secara proaktif mengembangkan berbagai rencana dan kebijakan pembangunan daerahnya. Otonomi Daerah ini mendorong pertumbuhan kemandirian daerah dengan pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) yang mengakomodasikan berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti direfleksikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.

Secara umum, beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini paling tidak adalah; *pertama*, otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara kesatuan; *kedua*, pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan tata cara desentralistis, dengan demikian peran daerah sangat menentukan; *ketiga*, pelaksanaan Otonomi Daerah harus dimulai dengan mendefenisikan kewenangan, organisasi, personal kemudian diikuti dengan keuangan, bukan sebaliknya; *keempat*, perimbangan keuangan yang dimaksud adalah perimbangan horizontal/ antar Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, di samping itu perimbangan vertikal, antar pusat dan daerah; *kelima*, fungsi pemerintah Pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertahanan, luar negeri, dan hukum), maupun untuk mengatasi ketimpangan antar Daerah (Kaloh, 2002: 47).

Perkembangan politik lokal yang berimbas dari Otonomi Daerah saat sekarang ini membuat daerah yang menunjukkan jati dirinya sehingga kadang kala terjadi konflik dari otonomi, sehingga dalam kajian politik lokal ini membuat penulis terfokus pada masalah yang mengkrucut pada persoalan konflik politik masyarakat lokal, khususnya konflik tapal batas sebuah wilayah.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu selalu dikembangkan hubungan yang serasi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah serta antar Daerah dan antar kelompok masyarakat dalam lintas agama dan budaya guna mempererat dan menumbuhkan semangat kesatuan. Hal ini mengingat dalam peranan otonomi saat ini kebebasan dapat memicu fanatisme kedaerahan yang hanya berorientasi pada

primordialisme yang sempit. Disamping itu perlu dilakukan identifikasi dan penyamaan visi dan persepsi dalam penanganan hal-hal yang menunjukkan sumber kerawanan konflik seperti berikut ini:

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di perbatasan antar Provinsi, Kabupaten/ Kota.
2. Disparitas (perbedaan) antara satu daerah dengan daerah lainnya.
3. Egoisme “keakuan” dari masing-masing daerah yang tidak menyadari eksistensinya diantara daerah lainnya.
4. Disparitas antar etnis, antar wilayah, antar tingkat pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat budaya.
5. Bentuk dan jenis pelayanan masyarakat yang dipengaruhi secara ketat oleh batas wilayah sehingga membingungkan masyarakat (Kaloh, 2002; 99).

Guna menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah sengketa tapal batas daerah maka diperlukan kerjasama yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan antara pusat dengan daerah dan antara daerah dengan masyarakat. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau wilayah sengketa sekitar Kabupaten/Kota yang terjadi, sebagai implementasi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan karena itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya permasalahan dan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan. Permasalahan

tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah. Dalam ruang lingkup tapal batas daerah itulah harus dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Direktur Perbatasan Depdagri, 2002; 2).

Konflik yang berkembang saat ini di Indonesia adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal terjadi antara rakyat dan pemerintah, sedangkan konflik horizontal sering terjadi karena unsur politisnya sangat kental sekali dan rentan dengan konflik. Konflik horizontal yang berkaitan dengan tapal batas ini adalah konflik horizontal yang bersifat politis ekonomis, atau gabungan dari kedua unsur itu, yaitu konflik antar kelompok masyarakat.

Konflik horizontal merupakan ekor atau efek ikutan dari konflik-konflik yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karenanya secara obyektif telah muncul konflik dalam masyarakat, maka pihak yang bertikai dapat mengundang simpati atau solidaritas sosial dan komunal, sehingga konflik merembet pada akar rumput. Pada kasus ini timbulnya konflik horizontal umumnya disebabkan karena terjadinya perselisihan paham dalam hal yang batas wilayah, seperti konflik tapal batas ini yang hanya mempersoalkan masalah administrasi dalam sebuah pemerintahan, serta penggunaan dan pembagian atas wilayah.

Sejak implementasi Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, batas antar daerah

menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah.

Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas wilayah antara Kecamatan Kuantan Tengah dengan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselelator. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa /kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas.

Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Pemerintah Kabupaten, Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung

upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antar daerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi. Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi. Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi regional (antar-daerah).

Di samping itu, Kabupaten/kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang. Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut. Mengacu pada penjelasan Pruitt dan Rubin tersebut, dapat diasumsikan ada obyek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing-masing pihak. Rumusan obyek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai obyek bernilai (Pruitt dan Rubin, 2004).

Konflik geografis ini pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah konflik yang sudah lama terjadi, berawal sejak pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu . Pada awalnya kepemilikan hak tanah ulayat ini secara hukum adat adalah hak milik kenegerian Kopah. Sebagai konsekuensinya terhadap kepemilikan tanah ini awal mulanya kenegerian Benai hanya membayar dengan sehelai. Masalah inilah yang melatar belakangi konflik ini terjadi sehingga konflik yang berkepanjangan ini tak kunjung terselesaikan baik oleh pihak adat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan yang menyelesaikan permasalahan ini.

Dengan berdirinya Kecamatan Benai sebagai kecamatan defenitif yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah pada bulan Januari Tahun 1996 masih menyisakan permasalahan tentang batas antara kedua kecamatan (Desa Banjar Benai Kecamatan Benai dengan Desa Munsalo Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah) yang menyebabkannya sering terjadi konflik horizontal ditengah masyarakat.

Terhadap permasalahan tersebut, upaya-upaya dialog baik yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, tokoh masyarakat, Ninik Mamak dari kedua kenegerian dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tanggal 25 Desember 2001 telah tercapai kesepakatan tentang batas kedua kenegerian (batas ulayat) yaitu Simpang Desa Gunung Kesiangan. Dengan demikian ulayat yang berada di belakang tugu (sebelah Selatan) adalah ulayat Kenegerian Kopah, Kecamatan

Kuantan Tengah, ulayat berada didepan tugu (sebelah Utara) adalah ulayat Kenegerian Benai, Kecamatan Benai. Batas wilayah administrasi akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi namun sampai sekarang belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Permasalahan ini kembali mengemuka setelah berdirinya Pos Babinsa Kenegerian Kopah Desa Munsalo pada wilayah Desa Banjar Benai yang kemudian direspon oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Banjar Benai pada tanggal 05 Februari 2006 yang menginginkan pencopotan papan nama Pos Babinsa tersebut Terhadap permasalahan itu masyarakat Kenegerian Kopah bereaksi dengan melakukan pencopotan papan nama yang bertuliskan nama Dusun, Desa serta Kecamatan Benai pada hari Senin 06 Maret 2006 terjadi di PT. Duta Palma Nusantara Sei Kuko dan Sei Kuantan termasuk papan nama bangunan USB SMPN 1 Benai kelas jauh Sei Kuko sehingga mengganggu kelancaran proses pembangunan sekolah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 08 Maret 2006 dengan kesepakatan antara lain kedua belah pihak menyetujui pembangunan SMP kelas jauh dengan tidak mengatas namakan Kecamatan Benai ataupun Kecamatan Kuantan Tengah, akan tetapi mengatasnamakan Kabupaten Kuantan Singingi sampai dengan selesainya permasalahan tapal batas antar kedua kecamatan.

Pada tanggal 01 Mei 2006 dilakukan kembali dialog pembahasan batas administrasi kedua kecamatan. Karena belum tercapai kesepakatan tentang batas administrasi dimaksud, maka kedua belah pihak sepakat melakukan peninjauan

lapangan dengan melibatkan BPN Kabupaten Kuantan Singingi sebagai upaya memperoleh gambaran yang jelas tentang batas yang disepakati serta koordinatnya. Pada awal bulan Oktober 2006 kembali terjadi gejolak ditengah masyarakat dengan adanya gangguan dan pengrusakan pembangunan SMP Kelas Jauh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah prefentif yang dilakukan pemerintah selama ini sia-sia saja, karena dari kedua belah pihak tidak ada I'tikad baik untuk menyelesaikannya. Sampai sekarang masih bergejolak konflik tapal batas ini.

Sikap Ninik Mamak dan aparatur pemerintrahan kedua desa masih bersikeras dan saling mempertahankan pendapatnya. Padahal penetapan tapal batas tersebut hanyalah sebuah persyaratan administrasi pemerintah desa di dalam pemerintahan.

Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh kenegerian Benai yang akhirnya mengambil alih berdasarkan Hukum Fositif atau Hukum Pemerintah yang dijadikan bukti kepemilikan tanah tersebut. Namun konflik yang berkembang sampai hari ini belum terselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan di atas maka sebagai usaha pemecahan dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu dan sudah saatnya dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap konflik yang terjadi dari kasus tapal batas ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi (Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan Tengah Dengan Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi).***

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Konflik Tapal Batas yang terjadi di Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah dengan Desa Banjar Benai Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah kajian penelitian ini sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik batas wilayah antara Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah dengan Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Bagaimana implikasi dari konflik batas wilayah antara Desa Munsalo dengan Desa Banjar Benai bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik antara Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah dengan Desa Banjar Benai Kecamatan Benai.
- b. Untuk mengetahui implikasi konflik batas wilayah antara Desa Munsalo dengan Desa Banjar Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Memperkaya dan mempertajam khasanah keilmuan bagi perkembangan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya studi manajemen pemerintah daerah.
- b. Sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sumbangsih pemecahan masalah bagi masyarakat Kenegerian Kopah (Kecamatan Kuantan Tengah) dan Kenegerian Benai (Kecamatan Benai)
- d. Seluruh masyarakat Kuantan Singingi.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

Telah disebutkan pada Bab sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah konflik dalam penegasan batas wilayah antara Kecamatan Kuantan tengah dengan Kecamatan Benai. Berkaitan dengan tema konflik mengenai batas wilayah tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus dari sejumlah kasus konflik mengenai batas daerah yang terjadi di daerah-daerah lain.

Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya bahasan, kajian, atau pun studi berkaitan dengan tema tersebut yang beberapa di antaranya digunakan dalam laporan penelitian ini sebagai referensi. Demikianlah sangat disadari bahwa bahasan dalam penelitian ini tidak dapat terasing dari kajian-kajian, bahasan, studi-studi dengan tema yang relevan lainnya yang dilakukan sebelumnya. Memahami tema penelitian secara teoretis akan membantu dalam memahami permasalahan penelitian secara lebih mendalam dan terarah.

Kerangka teoritik merupakan teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan variable yang akan dikaji dan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan sebagai hipotesis (Sugiyono, 1998: 200). Sedangkan kerangka teori serangkaian asumsi konsep, abstrak dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, berikut penulis akan menjelaskan kerangka teoritik berikut ini 12

2.1.Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk (*interchangeably*). Kedua istilah tersebut secara akademik bisa dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan. Karena itu tidak mungkin masalah Otonomi Daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Bahkan menurut banyak kalangan Otonomi Daerah adalah desentralisasi itu sendiri.

Adapun visi penting dari Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama : Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Syaukani, 2002). Dibidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang merespon terhadap kepentingan masyarakat luas dan memilihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Demokratisasi pemerintahan juga berarti adanya transpsransi kebijakan. Artinya untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dipikul, siapa yang diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus bertanggungjawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi Daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam konteks ini, Otonomi Daerah akan

memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang sosial dan budaya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif dalam menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan disekitarnya (Tim ICCE UIN Jakarta: 2003).

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan Otonomi Daerah adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkat daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas "*Medebewind*" atau asas pembantuan. Proses dari dentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.

Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administrasi lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (*public*), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang (HAW. Widjaja, 2000: 76-77).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

2.2.Kecamatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang -undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun

tidak memiliki 11 daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

2.3. Konflik

Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap fungsionalisme struktural dan akibat sebagai kritik. Teori konflik ini berasal dari berbagai sumber lain seperti teori Marxian dan pemikiran konflik sosial dari Simmel (1960). Pada tahun 1960-an, teori konflik menyediakan alternatif terhadap fungsionalisme struktural, tetapi dalam beberapa tahun terakhir telah digantikan oleh berbagai macam teori neo-Marxian. Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-fungsionalnya. Teori ini lebih merupakan sejenis fungsionalisme struktural yang angkuh ketimbang teori yang benar-benar berpandangan kritis terhadap masyarakat (G.Ritzer, D.J Goodman, 2000: 153).

Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik-konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun membinasakan lawannya tidak selalu harus diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik alias melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tak disetujuinya (J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto, 2006: 68).

Perbedaan kebudayaanpun menimbulkan konflik-konflik. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi malahan antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas, sehingga apabila terjadi konflik-konflik karena alasan ini, konflik-konflik itu akan bersifat luas dan karenanya akan bersifat konflik antar kelompok.

Kepentingan-kepentingan yang berbeda pun memudahkan terjadinya konflik. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Kepentingan pengusaha becak dan kepentingan aparat penertiban kota, misalnya, jelas berbeda; dan salah-salah bisa berbenturan dalam suatu konflik yang keras.

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi, misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik.

Salah satu akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya solidaritas intern rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.

Sejalan dengan peristiwa diatas, konflik-konflik antar kelompok pun memudahkan perubahan dan perubahan kepribadian individu. Apabila terjadi pertentangan antara dua kelompok yang berlainan, individu-individu akan mudah mengubah kepribadiannya untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok.

Tak terbantahkan, konflik juga menertibkan akibat-akibat yang negatif. Dalam konflik-konflik fisik, seperti peperangan, korban-korban akan berjatuh dan jumlah harta benda akan hancur luluh. Konflik itu berakhir dalam berbagai kemungkinan. Apabila kekuatan masing-masing pihak bertentangan ternyata berimbang, maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila kekuatan yang tengah bentrok itu tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominasi) oleh salah satu pihak yang kuat terhadap lawannya. Konflik-konflik yang terjadi itu bisa berlangsung dalam skala yang kecil, misalnya pertentangan antara orang yang bersifat pribadi. Akan tetapi, tidak sedikit pula terjadi pertentangan-pertentangan. Pertentangan rasial atau pertentangan kelas adalah dua contoh terkenal. Pertentangan politik adalah contoh lain yang berskala besar. Konflik politik seperti ini dapat melibatkan golongan-golongan dalam masyarakat, dan dapat pula melibatkan Negara-negara yang berdaulat. Konflik-konflik politik yang melibatkan Negara-negara berdaulat ini pun jarang mengakibatkan peperangan.

Teori konflik lebih menitik beratkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tata tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan keseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi diantara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal itu, perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan akan cenderung saling berkonflik. Melalui persaingan itu, maka kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan menciptakan hukum dan aturan-aturan yang menjamin kepentingan mereka dimenangkan (Quinney, 1979; 115-160 dalam Clinard dan Meier, 1989).

Teori konflik politik yang telah dikemukakan oleh banyak ahli sosiolog antara lain Karl Marx, Ralf Dahrenrof, George Simmel, dan Lewis Coser. Teori konflik politik yang digagas oleh Karl Marx didasari pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Karl Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum Borjuis yang menguasai sarana ekonomi dan kaum prolenter atau kaum buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kaum ini selalu terjadi konflik.

Dalam *The Communist Manifesto*, Karl Marx (dalam Johnson, 1981;146) mengatakan “*sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas*”, yaitu kelas buruh melawan kelas borjuis, yang akhirnya dimenangkan kaum prolenter, sehingga tercipta tatanan masyarakat tanpa hirarkis, yakni komunisme. Karl Marx melihat masyarakat sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.

Sedangkan menurut (Ralf Dahrendorf.1813) merupakan penerus gagasan Karl Marx, melakukan revisi pada pemikiran teori Karl Marx, baginya pengelompokan sosial tidak hanya lagi didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Terdapat sejumlah orang yang memiliki dan turut serta dalam kekuasaan, terdapat pula yang tidak termasuk kekuasaan. Menurut Ralf Dahrendoft sebagai revisi dari pemikiran Karl Marx, telah terjadi dekomposisi tenaga kerja (kaum prolentar tidak lagi homogen; secara hierarkis diantara mereka tersebar menempati posisi tertentu), dan timbulnya kelas menengah baru (karena terjadinya peningkatan kesejahteraan di kalangan kaum buruh).

Dalam hal ini terkandung tiga konsep penting yaitu : kekuasaan, kepentingan dan kelompok sosial. Pada gilirannya nanti, diferensiasi kepentingan yang terjadi dapat melahirkan kelompok konflik potensial atau kelompok konflik aktual yang berbenturan karena punya kepentingan antagonistik.

Menurut teori konflik politik yang dikemukakan oleh (Maswadi Rauf. 2003), terdiri dari berapa bagian teori konflik politik yaitu :

1. Konflik sosial (termasuk konflik politik) adalah sebuah fenomena sosial penting yang memerlukan penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Konflik sosial juga merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Semakin hebat konflik, semakin sulit membuat keputusan yang mengikat semua.
2. Konflik terjadi bila ada minimal dua pihak (individu atau kelompok) yang terlibat perbedaan pendapat. Perbedaan ini disadari oleh semuanya sehingga mereka tahu ada pihak lain yang bertentangan dengan pendapat mereka.
3. Lawan dari konflik adalah konsensus. Konsensus yang juga disebut mufakat atau kesepakatan terjadi bila semua pihak mempunyai pendapat yang sama. Oleh karena itu terjadi konflik bila tidak ada konsensus, dan konsensus terjadi bila konflik berhasil dihilangkan.

4. Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang selalu ditemukan di dalam setiap masyarakat. Konflik tidak akan pernah bisa dihilangkan karena setiap hubungan sosial mempunyai potensi untuk menghasilkan konflik.
5. Namun konflik dapat mengganggu hubungan sosial dan mengancam keberadaan masyarakat bila konflik berkembang terus (tanpa bisa diselesaikan) yang mengakibatkan disintegrasi sosial (dan disintegrasi politik). Masyarakat akan terbelah sesuai dengan polarisasi yang ditimbulkan oleh konflik.
6. Semakin demokratis sebuah negara, semakin besar kemungkinan terjadinya konflik didalam masyarakat karena kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat menghasilkan konflik yang meluas didalam masyarakat.
7. Oleh karena itu salah satu persyaratan terpenting bagi demokrasi adalah adanya kemampuan dari pemerintah dan rakyat untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial dan disintegrasi politik.
8. Penyelesaian konflik bisa ditempuh dengan cara persuasif (perundingan) dan cara koersif (kekerasan).
9. Idealnya adalah cara penyelesaian konflik secara persuasif karena digunakan secara rasional dalam bentuk musyawarah. Cara koersif dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bukanlah nilai-nilai manusiawi.
10. Penyelesaian konflik secara persuasif hanya bisa dicapai bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak bersifat fanatik dan arogan, sehingga bersedia menerima pendapat pihak lain dan mau mengurangi tuntutan sendiri. Hanya dengan cara begitu, titik temu (kompromi) bisa dihasilkan.
11. Kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik. Hal-hal yang ditentang

oleh semua dibuang dengan persetujuan dari setiap pihak yang berkonflik. Hal-hal yang sama juga bisa diambil dari pendapat pihak lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.

12. Bila kompromi sulit dicapai, berarti konflik sulit diselesaikan. Yang terjadi kemudian adalah munculnya gangguan terhadap hubungan sosial yang harmonis dan kemungkinan terjadinya ancaman bagi keutuhan masyarakat.

Banyak teori konflik batas wilayah ini berkembang di Indonesia termasuk juga sebagai penjabaran undang-undang dan pertauran pemerintah yang ada di negara ini, kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik wewenang lainnya. Para peneliti dari Yayasan Harkat Bangsa, misalnya telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menandai buruknya pembagian kewenangan antar Pusat – Provinsi - Kabupaten/Kota di Indonesia. Disamping itu kuatnya nuansa penyeragaman (*Uniformitas*) kebijakan Pusat terhadap heterogenitas daerah yang banyak menimbulkan konflik ditingkat lokal. Masalah tersebut muncul karena adanya beberapa kelemahan fatal UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang saat ini tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 pada bulan Oktober 2005) (Tri Rahmawati: 2005).

Menurut Edward Azar (2007), menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu :

Pertama, hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya, terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap Negara/pemerintah.

Kedua, konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi SDA di daerah-daerah yang dilanda konflik.

Ketiga, sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi SDA.

Keempat, konflik internal dikaitkan dengan *International Linkages*, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya, dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

2.4 Undang-undang Pokok Agraria

Di Indonesia salah satu bentuk wujud pluralisme hukum ini adalah hokum adat. R. Soepomo, salah seorang bapak pendiri bangsa yang juga mirip C. Van Vollenhoven melihat hokum adat sebagai non statutair yang sebagian besar hukum adat sebagai non statutair yang sebagian besar adalah hukum dan kebiasaan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itu yang melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisi asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Melanjutkan penjelasannya dengan mengutip pendapat Von Savigny:

“Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Konsep masyarakat adat tentang hak ulayat adalah penguasaan tanah yang didasari pada konsep dari masyarakat setempat secara turun temurun. Penguasaan tanah yang dimaksud menyangkut segala sesuatu yang ada bawah permukaan (tambang), status permukaan tanah dan segala sesuatu di atas tanah termasuk, hutan, binatang, air dan sebagainya.

Menurut Iman Sudiyat, hak ulayat tidak terlepas dari ciri-ciri;

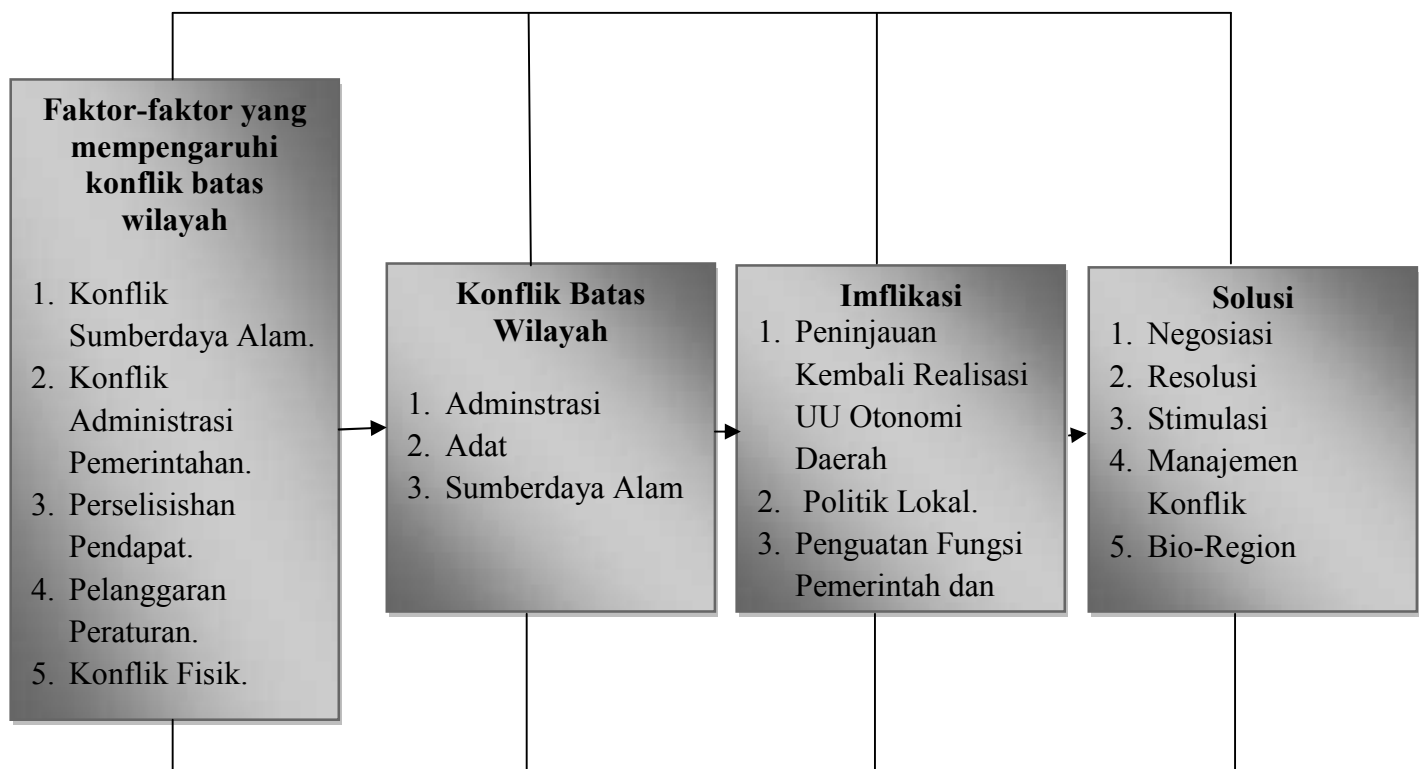
1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta pada warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin tersebut dianggap melakukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan restiksi, hanya untuk keperluan shomah/brayat/keluarganya sendiri.
4. Jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga mendapat izin lebih dahulu.
5. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, kepada persekutuan hukum. (Halkis, 2006,10-11).

Konstitusi Negara yaitu UUD 45 pada awal kemerdekaan tidak memuat satu pasalpun yang berkaitan dengan hak ulayat atau hak yang serupa dengan itu. Ketika hak ulayat dibicarakan, para sarjana hukum kita mengkaitkan dengan ayat (3) pasal 33 UUD 45 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini yang ditemukan

hanya fungsional fragmatis, tapi belum menemukan eksistensi dan struktural hak ulayat itu. Konstitusi ini menjadi pedoman pokok dalam dua era pemerintahan walaupun orde lama pernah mengalami penggantian yaitu UUDS dan UUD RIS namun tidak sempat melahirkan undang-undang hingga zaman orde baru yang kembali kepada UUD 45 tanpa perubahan sampai kekuasaannya berakhir.

AP. Parlindungan menilai UUPA merupakan karya besar bangsa Indonesia dibidang hukum setelah proklamasi Indonesia. Menurut S. Adiwinata menyatakan UUPA bukan saja menyangkut masalah hukum tanah di Indonesia tapi juga secara tidak langsung merombak sistem hukum adat itu sendiri. Walaupun UU. No 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian terdapat banyak kelemahan dan kritikan, namun dengan berlakunya UUPA ini domain begensel dan dualisme hukum berhasil. UUPA berhasil memisahkan sistem kepemilikan hukum barat dengan memasukkannya secara tegas pemberlakuan hukum Indonesia, sehingga buku II *Burgelijk Wetboek* dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pertanahan, air dan angkasa setelah disahkannya UUPA ini dicabut.

2.5 Kerangka Pemikiran



(Kaloh, J., Mencari Bentuk Otonomi, 2002)

2.6 Konsep Operasional

- a. **Konflik** adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan, serta ancaman kondisi sosial kemasyarakatan dan tatanan pemerintahan.
- b. **Wilayah** adalah merupakan kesatuan unit kerja sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan pemerintahan.
- c. **Otonomi Desa** adalah kewenangan desa otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. **Tapal Batas** adalah pemisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, yang mana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan wewenang masing-masing daerah.

2.7 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item Penilaian
Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi	Perselisihan Pendapat	Pengakuan/Klaim atas Wilayah
	Pelanggaran Peraturan	Musyawarah dan Mupakat (berunding) Kesalahan Prosedur Administrasi Sanksi
	Konflik Fisik	Adu Fisik Kepentingan Pribadi atau Kelompok Kerugian Akibat Konflik Inmateri dan Materi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah dengan Kecamatan Benai Tahun 2011.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif serta pendeskripsian data yang dimutakhirkan dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam (*In deph Interview*).

3.3. Sumber Data

- a. Sumber kunci (*key informan*) tokoh masyarakat dari Kenegerian Kopah.
- b. Sumber kunci (*key Informan*) tokoh masyarakat dari Kenegerian Benai.
- c. Diantara beberapa sumber kunci dari kedua kecamatan/Desa, seperti : Ninik Mamak, Orang adat, Kepala Desa (perangkat Desa)
- d. Pemerintah daerah sebagai sumber pembanding yang akan mengambil keputusan dari masalah tapal batas ini.

3.4. Populasi dan Sampel

33

No	Uraian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat	2	2	100%
2	Kepala Desa	10	5	100%
3	Ninik Mamak	8	8	100%
4	Tokoh Masyarakat	2	2	100%
5	BPN	6	6	100%
6	Masyarakat	30	15	100%
7	Pemda	9	9	100%
Jumlah		67	52	100%

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penelitian harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

1. Wawancara mendalam atau *In deph interview* , yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi dan data yang valid baik menggunakan alat perekam maupun alat pencatat.
2. Angket, adalah sekumpulan pertanyaan yang penulis sajikan untuk dijadikan bahan analisis data lapangan.
3. *Observasi*, adalah suatu bentuk kegiatan pengumpulan data oleh peneliti melakukan pengamatan atau terjun langsung ke lokasi penelitian.
4. Pemanfaatan Kepustakaan, adalah sebuah kegiatan ilmiah dalam penelitian yang dilakukan peneliti sebagai pelengkap dan penguat argumentasi dalam penelitian.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh Informasi, keterangan-keterangan yang berasal dari dokumen, laporan dan arsip yang didapat dari pihak-pihak terkait.

Adapun data-data sekunder tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Keadaan Geografis dan Demografis Kabupaten Kuantan Singingi
3. Geo-politik Kabupaten Kuantan Singingi
4. Kondisi politik lokal Kabupaten Kuantan Singingi

5. Kondisi kultur masyarakat Kuantan Singingi
6. Serta data-data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri sebagai lokomotif penelitian yang penulis lakukan. Peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Menurut Lexi J. Moleong (1988; 177) penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitianlah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Hal ini mungkin dapat dipenuhi karena peneliti langsung ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.Teknik Analisa Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empirik, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Fungsi analisis data yang utama adalah untuk menyusun abstraksi berdasarkan data yang terkumpul dapat berbentuk data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif untuk diabstraksikan, sedangkan jenis data kuantitatif berfungsi untuk membahas fenomena yang dapat dikuantitatifkan dengan menampilkan tabel frekuensi dan persentase untuk melihat kecenderungan-kecenderungan dari sikap dan persepsi informan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi

Zaman dahulu Kuantan Singingi yang dikenal dengan sebutan Rantau Kuantan merupakan suatu daerah yang berada dibawah Pemerintahan Datuk sebagai pemegang teraju adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Daerah ini juga disebut Rantau Nan Kurang Oso Duo Pulau artinya rantau yang kurang satu dari dua puluh dengan demikian ada 19 rantau yang tercakup didalamnya yaitu meliputi kenegerian disepanjang aliran Sungai Kuantan yang dimulai dari Lubuk Ambacang dibagian Hulu sampai ke Cerenti sebagai bagian hilir (UU Hamidi, 1995: 1).

Sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dimana pemerintah yang tadinya dibawah pemerintahan datuk, kini berubah bentuk menjadi sistem dan corak pemerintahan modern yang merupakan penjabaran UUD 1945 yang berlaku di negara ini dan begitu juga halnya pada 19 rantau yang kini sudah dibagi desa-desa yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sepintas melihat dari sejarah berdirinya, Kuantan Singingi dapat dikatakan sebagai Kabupaten baru. Pada awalnya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang pada waktu itu sebagai Kabupaten Induk. Dengan bergulirnya Era Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, semua bentuk otoritas kekuasaan yang terpusat kepada pemerintahan yang otoriter, menutup mati sistem demokrasi yang berkembang, sehingga momen ini membuka ruang gerak yang begitu luas bagi Tokoh dan Masyarakat Kuantan Singingi dalam menyuarakan aspirasi³⁷ adap pembentukan Kabupaten baru.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya dibawah pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sebuah Kecamatan. Namun setelah dikeluarkannya undang-undang

Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah kabupaten defentif yang mempunyai 12 kecamatan.

4.2.Kondisi Geografis, Tofografi, Hidrologi, Klimaologi.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang berkembang dengan pesat dapat dilaihat dari luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yang terletak pada :

- 0⁰ 00 Lintang Utara – 1⁰ 00 Lintang Selatan.
- 101⁰ 02 Bujur Barat – 101⁰ 55 Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Kurang Lebih 7.656,03 Km Bujur Sangkar, dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 Meter dari permukaan laut.

Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ini berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Selatan : Propinsi Jambi
- Sebelah Barat : Propinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu. (Kuansing Dalam Angka, Tahun 2011)

Kabupaten Kuantan Singingi sebagian bagian dari Provinsi Riau terletak pada jalur perhubungan lalu lintas darat antara Provinsi Sumatra Barat dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan lalu lintas darat dengan ibukota Provinsi (Pekanbaru) dapat ditempun dengan jarak yang begitu singkat sehingga mobilitas masyarakat cukup tinggi. Termasuk hubungan perdagangan dengan Provinsi Sumatra Barat berjalan lancar, dikarenakan kedekatan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Provinsi tersebut juga tidak terlalu jauh sehingga mudah dijangkau.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu: Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Keberadaan kedua sungai itu memiliki potensi dan peranan yang begitu besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan masyarakat terhadap sungai dalam memanfaatkannya sebagai sumber air bersih, budidaya perikanan dan sumber daya buatan tenaga listrik.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $32,6^{\circ}\text{C}$ – $36,5^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum berkisar antara $19,2^{\circ}\text{C}$ – $22,0^{\circ}\text{C}$. Curah hujan antara 74,00 – 327,50 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan September s.d Februari.
- Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s.d Agustus. (Kuansing Dalam Angka Tahun 2011).

4.3.Komposisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

4.3.1. Penduduk

Permasalahan umum kependudukan adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas. Kabupaten Kuantan Singingi juga menghadapi permasalahan yang sama.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.

Senada dengan Kabupaten lain, permasalahan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan angka harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 2011 berjumlah 320.314 jiwa dengan jumlah laki-laki 165. 233 jiwa dan perempuan 155.081 jiwa. Dapat dilihat dari table berikut :

Tabel. IV.1 : Rasio Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	165.233 Jiwa
2	Perempuan	155.081 Jiwa
Total		320.314 Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuantan Singingi Tahun 2011

4.3.2. Tenaga Kerja

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan (supply) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja (demand) yang cukup akan menciptakan pengangguran .

4.3.3. Keadaan Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribu kota di Teluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Pada tahun 2001 Kabupaten Kuantan Singingi terdiri 6 kecamatan defenitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa, defenitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Perda Nomor. 16 Tahun 2002, Maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan defenitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa defenitif. Kini, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 198 desa.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi yang baru berdiri tanggal 12 Oktober 1999, secara administratif dipimpin oleh seorang Bupati yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, sistem pemerintahan pada akhirnya lebih bersifat desentralisasi walaupun belum secara keseluruhan. Berdasarkan sistem itu pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wewenang dalam menentukan bidang pemerintahannya. Kabupaten Kuantan Singingi didalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati.

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, Bupati dalam menggerakkan aktivitas pemerintahannya telah membentuk Struktur organisasi Tata kerja (SOT) baru atas dasar Pertauran Daerah No. 34 sampai dengan 59 Tahun 2001 yang terdiri dari 2 (dua) Sekretariat yaitu Daerah dan Dewan, 17 (tujuh belas) Dinas, dan 5 (lima) Badan. (Kuantan Singingi Dalam Angka 2011).

Tabel IV. 2 : Nama Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011

No	Dinas
1	Dinas Pendapatan
2	Dinas Pendidikan
3	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
4	Dinas Kesehatan
5	Dinas Kehutanan

6	Dinas Tanaman Pangan
7	Dinas Perkebunan
8	Dinas Perikanan
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
11	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
12	Dinas Pasar dan Kebersihan
13	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
14	Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi
15	Dinas Peternakan
16	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan
17	Dinas Sosial dan Tenaga kerja

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka 2011

Dinas dan Badan merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas membantu kegiatan Bupati dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari yang sesuai dengan wewenang, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Tabel IV. 3 : Nama Badan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Badan
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Bencana
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Perlindungan Masyarakat
4	Badan Kepegawaian Daerah
5	Badan Lingkungan Hidup Promosi dan Investasi
JML	Lima Badan

Sumber : Kuantan Singingi Dalam Angka 2011

Tabel. IV. 4 : Nama-nama Bupati di Kuantan Singingi Tahun 2000-2011

	Nama Pejabat	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Drs. Rusdji S. Abrus	Bupati	Tahun 2000 – 2001
2.	Drs. H. Asrul Ja'far	Bupati	Tahun 2001 - 2005
3.	H. Sukarmis	Bupati	Tahun 2006- sekarang

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 Kecamatan defenitif yang mencakup 11 Kelurahan, 198 Desa defenitif.

Tabel. IV. 5 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa
1	Singingi	Muara Lembu	1	12
2	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	1	29
3	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	3	24
4	Benai	Benai	2	24
5	Kuantan Hilir	Baserah	2	26
6	Cerenti	Cerenti	2	9
7	Singingi Hilir	Koto Baru	-	12
8	Gunung Toar	Gunung Toar	-	13
9	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	-	11
10	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	-	13
11	Pangean	Pangean	-	14
12	Inuman	Inuman	-	9
	Total	12	11	198

Sumber: Bupati/Setda Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Berdasarkan table diatas dilihat bahwa Desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik yang tercatat 29 Desa. Sedangkan urutan kedua terdapat di Kecamatan Kuantan Hilir sebanyak 26 Desa, kemudian urutan ketiga di Kecamatan Benai yang berjumlah 24 Desa, dan Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 24 Desa. Dan urutan keempat Kecamatan Pangean yang berjumlah 14 Desa.

Untuk urutan yang paling sedikit desanya terdapat di Kecamatan Cerenti dan Inuman. Dengan demikian, penyebaran Desa dimasing-masing Kecamatan tidak merata, hal ini dipengaruhi oleh aspek pemekaran Kecamatan yang tidak imbang. Kondisi seperti ini juga

akan berpengaruh bagi tingkat penyebaran dan kepadatan penduduk dimasing-masing wilayah Kecamatan. *(Kuansing Dalam Angka Tahun 2011.*

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Perjalanan Konflik Politik Tapal Batas di Kabupaten Kuantan Singingi

Perjalanan konflik di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebuah proses yang sangat panjang, terjadi di dua masa pemerintahan yang berbeda yakni awal konflik ini terjadi pada masa pemerintahan masih di Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang lima tahun. Setelah diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Indragiri Hulu dipecah menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Kuantan Singingi yang berdiri akhir tahun 1999, dengan diberlakukannya otonomi daerah ini percepatan pembangunan dan laju pemerintahan membuat daerah ini berkembang dengan pesat dan cepat. Begitu juga dengan perkembangan konflik batas wilayah ini yang tersisakan dari pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang dulunya sebagai kabupaten induk yang menangani masalah ini.

Bab ini merupakan pemaparan perjalanan konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, yang sampai hari ini belum juga terselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga pemerintahan desa yang bersengketa.

Dalam bab ini penulis menyajikan data dan masalah melalui narasi dan deskripsi bagaimana penulis menggambarkan dan menceritakan konflik batas wilayah ini lebih menyeluruh dan mendalam sehingga ⁴⁶ ini bisa mengungkap masalah dari data dan analisa penulis. Untuk lebih lanjut penulis akan memberikan beberapa periode perjalanan konflik yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut :

- 1) Periode Tahun 1995 -1998

Pada masa periode ini penanganan masalah konflik batas wilayah yang ada Kabupaten Kuantan Singingi masih ditangani oleh kabupaten induk, sebelum kabupaten definitif ini berdiri, maka dari itu Kabupaten Indragiri Hulu yang menangani masalah konflik batas wilayah yang dilatarbelakangi sumber daya alam (SDA). Sejak berdirinya sebuah perusahaan swasta yang berdiri diantara daerah rawan konflik pada tahun 1987 yang berdiri diatas wilayah sengketa yakni PT. Duta Palma Nusantara (DPN). Masalah ini masih bisa diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dan konflik batas wilayah ini tidak sampai kepada lembaga pemerintahan. Dengan dikeluarkannya PP Nomor. 33 Tahun 1995, berdirinya Kecamatan Benai sudah mendapat pengakuan hukum yang mengatur tentang keberadaan kecamatan ini sebagai kecamatan definitif yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah pada bulan Januari tahun 1996, ternyata masih menyisakan permasalahan tentang batas antara kedua kecamatan yang menyebabkan konflik horizontal ditengah masyarakat.

2) Periode 1999 -2003

Dengan dikeluarkannya PP Nomor. 33 Tahun 1995 tentang berdirinya kecamatan Benai, pada bulan Januari tahun 1996 masih menyisakan permasalahan tentang batas antara kedua kecamatan, yang menyebabkan sering timbulnya konflik horizontal ditengah masyarakat.

Periode ini sudah menunjukkan jati diri sebuah kabupaten yang definitif, dalam penanganan masalah batas wilayah yang terjadi di kawasan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu ini pindah tangan menjadi kasus yang berlanjut yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Kuantan Singingi sebagai imbas Otonomi Daerah yang bergulir sampai ke daerah khususnya ke daerah rawan konflik.

Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah Nomor. 32 Tahun 2004 perjalanan konflik pada periode ini sudah menjadi akar permasalahan yang terpenting, karena pada masa ini perjalanan konflik batas wilayah ini sudah bervariasi dalam bentuk adanya perlawanan diantara dua kubu yang bersengketa.

Terhadap permasalahan tersebut, upaya-upaya dialog, baik yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, maupun oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan, tokoh masyarakat, ninik mamak kedua kenegerian dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

Konflik berkejolak terjadi pada tanggal 25 Desember 2001 terjadinya kekerasan dan intimidasi diantara kedua belah pihak, akan tetapi konflik ini, tidak menyisakan bentrok fisik, peperangan, dan angkat senjata. Untuk dapat diketahui lebih lanjut bahwa pada periode ini tampuk pemerintahan yang dipegang oleh bupati yang berlainan, Sejak kepemimpinan Drs. H. Asrul Jaafar konflik ini berkembang dengan cepat, karena pemerintah daerah pada masa itu tidak serius menangani masalah konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada pertemuan pada tanggal 25 Desember 2001 tersebut, telah tercapai kesepakatan tentang batas kedua kenegerian (Batas Ulayat) tersebut yaitu di Persimpangan Desa Gunung Kesiangan, dengan demikian ulayat yang berada di belakang tugu (sebelah Selatan) adalah ulayat Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, sedangkan ulayat yang disebelah depan tugu (sebelah Utara) adalah ulayat Kenegerian Benai, sedangkan batas wilayah administrasi pemerintahan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi namun sampai sekarang belum juga tuntas karena belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. (*Data Olahan Lapangan 2011*)

3) Periode 2004 -2006

Periode inilah merupakan puncak penyelesaian konflik, dengan berakhirnya kepemimpinan Drs. H. Asrul Jaafar, berakhir pula penanganan masalah konflik batas wilayah pada periode kedua. Pada periode ketiga ini pada masa pemerintahan H. Sukarmis, adalah dimana masa inilah masa resolusi yang akan dicapai. Karena pada beberapa masa dan dekade konflik ini tetap berlanjut dan mencuat lagi kepermukaan.

Pada tanggal 05 Februari 2006, permasalahan ini kembali berkejolak setelah berdirinya Pos Babinsa Kenegerian Kopah Desa Munsalo pada wilayah Desa Banjar Benai. Masyarakat Kenegerian Benai menginginkan pencopotan papan nama Pos Babinsa. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 06 Maret 2006, masyarakat kenegerian Kopah bereaksi kembali melakukan pencopotan papan nama yang dituliskan atas nama dusun, desa, dan Kecamatan Benai yang ada di PT.Duta Palma Nusanatara Sei Kuko dan Sei Kuantan termasuk papan nama bangunan USB SMPN 1 Benai kelas jauh Sei Kuko sehingga mengganggu kelancaran proses kelanjutan pembangunan sekolah tersebut. *(Hasil Wawancara Dengan Masyarakat 2011)*

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak pada tanggal 08 Maret 2006 dengan kesepakatan antara lain kedua belah pihak menyetujui pembangunan SMP kelas jauh dengan tidak mengatasnamakan Kecamatan Benai ataupun Kecamatan Kuantan Tengah, akan tetapi mengatasnamakan Kabupaten Kuantan Singingi sampai selesainya permasalahan tapal batas antara kedua kecamatan.

Pada tanggal 01 Mei 2006 dilakukan kembali dialog pembahasan batas administrasi kedua kecamatan, dan karena belum tercapai kesepakatan tentang batas administrasi yang dimaksud. Maka kedua belah pihak sepakat melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan BPN Kabupaten Kuantan Singingi sebagai upaya memperoleh gambaran yang

jelas tentang batas yang disepakati beserta pelacakan koordinatnya. Perkembangan terakhir dilapangan, pada awal bulan Oktober 2006 kembali terjadi gejolak ditengah masyarakat dengan adanya gangguan dan pengrusakan pembangunan SMP kelas jauh oleh pihak-pihak tertentu, sekarang pembangunan SMP tersebut telah dibangun dikawasan Desa Talontam Kecamatan Benai. Sepanjang konflik batas wilayah ini bergejolak ditengah masyarakat, bentrok fisik yang menyebabkan korban dilapangan tidak terjadi. Hal inilah salah satu yang tidak diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar konflik dan bentrok fisik tidak terjadi.

Pada masa awal dilantiknya pemerintahan H. Sukarmis sebagai kepala daerah, dimana masa itu kepala daerah berusaha menyelami masalah ini dengan pendekatan hukum adat, kepala daerah berupaya mengembalikan masalah ini kepermasalahan adat, yakni menyatukan kedua masyarakat yang bersengketa dengan pendekatan adat yakni “ Bunga Setangkai”, upaya adat inilah yang akan menangani masalah konflik wilayah tapal batas yang terjadi di daerah ini.

Masalah tapal batas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah masalah yang agak rumit, karena secara administrasi pemerintahan sudah dianggap selesai, tetapi masalah ini mencuat karena masih mempertahankan kedua belah pihak dengan pendekatan hukum adat.

5.2. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Tapal Batas Di Kabupaten Kuantan Singingi

Sejak diberlakukannya PP. Nomor 33 Tahun 1995, tentang berdirinya kecamatan Benai sebagai kecamatan definitif, sejak itulah sisa-sisa konflik lama kembali mencuat, apalagi sejak digulirkannya era otonomi daerah, sehingga berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu konflik pun tak dapat diselesaikan dan sehingga konflik itu muncul kepermukaan dalam bentuk nyata, tetapi konflik ini tidak menyebabkan terjadinya konflik dan bentrok fisik, angkat senjata dan lain-lain.

Masalah batas wilayah, sumber daya alam dan budaya merupakan salah satu dari banyak faktor penting yang mempengaruhi desentralisasi di suatu negara, khususnya terhadap masalah perimbangan keuangan Pusat- Daerah sebagaimana ditulis oleh Richard M. Bird sebagai berikut:

“Sistem keuangan antar pemerintah pada setiap negara tidak bisa dipungkiri mencerminkan kompleksitas realitas negara yang bersangkutan. Masing-masing negara berbeda dalam banyak dimensi keuangan antar pemerintahnya; berapa banyak daerah tingkat II yang ada, seberapa besar ukuran relatif mereka dari sudut jumlah penduduk dan kapasitas ekonomi. Seberapa berbeda mereka dari pendapatan perkapita. Sumber daya alam adalah akar sejarah merupakan dorongan untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, bottom-up atau top-down, dengan damai atau kekerasan. Jenis geografis bagaimana yang dimiliki ; kesatuan atau tersebar, serta seberapa besar kebinekaan yang ada dari segi bahasa, kelompok etnis dan mitos kebudayaan pemersatu. Sampai seberapa jauh batas wilayah sesuai dengan dimensi-dimensi ini, apakah kepentingan regional terwakili secara eksplisit dalam struktur politik pusat”.

Pentingnya SDA dan potensi ekonomi menurut Bird diatas dibenarkan oleh Wijaya Adi seorang pengamat LIPI yang menyatakan bahwa faktor penguasaan SDA secara ‘psikologis’ dapat mempengaruhi percaya diri Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah telah menimbulkan reaksi yang beragam dari daerah. Di satu sisi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebaliknya daerah yang memiliki sumber daya alam sedikit menanggapi otonomi daerah ini dengan penuh

kekhawatiran. Ini berkaitan dengan kemungkinan mendapat ‘uang’ dari dana bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam.

Umumnya konflik tapal batas terjadi kerana masih berpegang dengan nilai luhur budaya, adat istiadat. Maka dari itu pemerintah daerah agak kewalahan dalam menangani konflik batas wilayah ini, karena ada sumber-sumber yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak.

Dalam penyajian data pada bab analisis data ini penulis membeberkan permasalahan dengan menganalisa tabel dari hasil angket yang penulis sebarikan kepada responden. Adapun analisa yang berkenaan dengan faktor-faktor penyebab konflik tersebut disediakan dalam bentuk tabel.

Dibawah ini adalah pernyataan responden tentang faktor konflik tapal batas dalam bentuk tabel yang dilihat dari berbagai macam karakteristik responden, yaitu karakteristik pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, *ninik mamak*, serta tokoh masyarakat.

Tabel V.1 : Tanggapan responden tentang penyebab terjadinya faktor-faktor konflik karena tapal batas

No	Faktor konflik tapal batas	SS	S	RR	TS	STS	Jumlah
1.	Merusak sistem kehidupan sosial	16	22	6	8	-	52
2.	Merusak sistem pemerintahan kedua kenegerian	14	28	10	-	-	52
3.	Merusak sistem ekonomi kedua kenegerian	14	22	6	10	-	52
4.	Konflik merupakan pelanggaran peraturan	8	34	6	4	-	52
5.	Aturan dan norma adat yang akan menyelesaikan masalah	6	24	12	6	4	52
6.	Sistem kehidupan berjalan baik	10	18	14	10	-	52
7.	Konflik batas wilayah menyebabkan kontak fisik	8	8	12	24	-	52
8.	Pelanggaran peraturan menyebabkan kontak fisik	6	9	9	24	4	52
9	Nilai kehidupan masyarakat dapat mempengaruhi konflik batas wilayah	-	22	12	14	4	52
Jumlah		82	187	87	100	12	468
Rata-rata		9,11	20,77	9,66	11,11	1,33	52
Persentase (%)		17,51	39,94	18,57	21,36	2,55	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel V. 1 diatas, dapat dilihat bahwa faktor penyebab konflik tapal batas yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi diketahui dari 52 orang responden yang memberikan tanggapan setuju dengan persentase 39,94 % dengan rata-rata 20,77 yang dinilai dari faktor-faktor yang menyebabkan konflik yang merusak berbagai sistem sosial kemasyarakatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Tanggapan yang lain tidak setuju mendapat persentase nilai 21,36 % dengan rata-rata 11,11 ini menunjukkan tanggapan masyarakat masih sangat berimbang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan konflik sehingga merusak semua tatanan kehidupan masyarakat.

Tabel V.2 : Tanggapan responden terhadap penyebab terjadinya konflik karena faktor legitimasi

No	Faktor legitimasi	SS	S	RR	TS	STS	Jumlah
1.	Nilai-nilai tradisonal yang mengikat kehidupan masyarakat.	12	8	-	32	-	52
2.	Konflik batas wilayah dapat diselesaikan dengan hukum adat.	29	8	4	11	-	52
3.	Konflik terjadi karena kesalahpahaman hukum adat.	14	8	22	8	-	52
4.	PP No.33 Tahun 1995 mengundang terjadinya konflik.	16	9	4	23	-	52
5.	Peraturan daerah yang dibuat bisa menyelesaikan konflik .	12	6	24	8	2	52
6.	UU agraria merugikan kaum adat.	24	9	4	12	3	52
7.	Perda yang dikeluarkan memberi dampak terhadap konflik. Perda	-	28	8	4	12	52
8.	yang dikeluarkan menyebabkan konflik.	19	16	9	6	2	52
9	Menyuruh pemda menyelsaikan konflik.	12	30	4	5	1	52
Jumlah		138	122	79	109	20	468
Rata-rata		15,33	13,55	8,77	12,11	2.22	52
Persentase (%)		29,48	26,05	16.86	23,28	4.26	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel V.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi disebabkan karena pelegitimasian undang-undang yang sangat merugikan masyarakat adat sehingga responden memberikan tanggapan sangat setuju dengan persentase 29,48 %, karena konflik batas wilayah ini terjadi karena faktor pelegitimasian undang-undang yang merugikan dan mengkerdikan peran dan fungsi masyarakat adat untuk mengelolah dan mengambil hak ulayatnya. Kita berharap konflik batas wilayah ini dapat diselesaikan dengan sistem dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Sejak diberlakukannya PP No. 33 Tahun 1995, tanggal 4 September 1995, berdirilah sebuah kecamatan Benai, yang selama ini masih menyisakan konflik, baik pihak pemerintah yang menjadi pasilitator dalam masalah ini maupun masarakat adat yang memahami masalah ini sebagai murni konflik adat, kedua belah pihak yang tidak mau mundur sedikitpun dalam penyelesaian masalah ini.

Apalagi sejak di berlakukannya otonomi daerah yang mana Kabupaten Kuantan Singingi berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, saat ini kabupaten menjadi sebuah kabupaten defenitif yang mempunyai 12 kecamatan yang terlingkup dalam kesatuan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disamping percepatan otonomi daerah yang diberikan pusat kepada daerah, membuat beberapa daerah berpotensi untuk konflik diantaranya konflik antara masyarakat adat dengan pihak swasta dan konflik masyarakat adat dengan Negara/ pemerintah daerah. Pada tingkat tertentu masyarakat adat sulit diberi pemahaman yang mendalam tentang administrasi pemerintahan dalam mengatur masalah pertanahan, karena sebagai wilayah pemerintahan agar mudah menjalankan fungsi pemerintah yang melayani dan melindungi masyarakat dari penyerobotan lahan oleh pihak swasta. Tetapi masyarakat adat menuduh pemerintah adalah dalang dibalik semua konflik ini terjadi, mengapa izin pendirian perusahaan swasta diatas

lahan yang potensi konfliknya sangat besar diberikan? Pertanyaan seperti inilah pemerintah belum bisa menjawab mengapa izin diatas wilayah konflik yang akhirnya akan mengorbankan masyarakat adat yang bodoh dan lemah. Dari masalah itulah timbul dan terjadinya konflik segitiga yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Antara masyarakat adat dengan pemerintah/Negara, antara masyarakat adat dengan pihak swasta/kapitalis.

Umumnya konflik tapal batas terjadi karena masih berpegang dengan nilai-nilai luhur budaya, dan adat istiadat. Maka dari itu pemerintah daerah kesusahan dalam menangani konflik batas wilayah ini. Karena ada sumber-sumber yang dipertahankan oleh kedua belah pihak serta ada pelegitimasi masing-masing wilayah disekitar konflik.

Dari hasil analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi hanya dipertajam dengan pelegitimasi kepemilikan wilayah dan tanah ulayat, karenanya konflik masih berkepanjangan dari masing-masing lebih merasa memiliki lahan yang dipertahankan sehingga menjadi ladang konflik yang berkepanjangan.

Tabel V.3 : Tanggapan responden terhadap tentang penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena faktor ekonomi

No	Faktor ekonomi	SS	S	RR	TS	STS	Jumlah
----	----------------	----	---	----	----	-----	--------

1.	Konflik batas wilayah karena eksploitasi SDA.	14	10	-	28	-	52
2.	Usaha untuk mendirikan perusahaan besar.	-	25	-	27	-	52
3.	SDA menimbulkan konflik.	16	10	10	16	-	52
4.	Saling mencari keuntungan dari konflik.	-	-	26	26	-	52
5.	Tokoh adat, pemerintahan desa saling memperjuangkan kepentingan masing-masing.	-	26	-	26	-	52
6.	Fee yang dibagikan untuk kepentingan desa.	14	19	-	19	-	52
7.	Keuntungan untuk sebelah	-	19	19	14	-	52
8.	pihak.	26	26	-	-	-	52
9.	Keuntungan untuk kepentingan desa.	-	14	12	26	-	52
	Keuntungan untuk orang-orang adat, perangkat desa.						
Jumlah		70	149	67	182	0	468
Rata-rata		7,77	16,55	7,44	20,22	0	52
Persentase (%)		14,94	31,82	14,30	38,88	0	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel V.3 diatas, dapat dilihat bahwa faktor penyebab pada sektor ekonomi rata-rata responden 38,88% menyatakan tidak setuju bahwa konflik batas wilayah ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, karenanya disebabkan pembangunan sebuah perusahaan swasta yang berdiri di lahan konflik. Keuntungan dan manfaat dari konflik ini masih dinikmati sebagian kecil masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam perjalanan konflik ini, oleh karena tanggapan yang diberikan responden 31,82% yang menyatakan setuju bahwa konflik ini adalah konflik sumber daya alam yang memberikan keuntungan sepihak kepada orang-orang tertentu.

Permasalahan ekonomi adalah masalah yang sangat menunjang timbulnya konflik batas wilayah, karena adanya kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi seperti ini, sehingga masyarakat yang menjadi sasaran konflik. Oleh

karena itulah konflik sumber daya alam terjadi, SDA yang potensial ini diatur dalam undang-undang Nomor.22 Tahun 1999, pasal 10, sehingga dalam penegelolaan sumber daya alam, daerah lebih merasa berhak mengatur dan menentukan kebijakan yang terjadi.

Di kabupaten Kuantan Singingi terjadi konflik yang terfokus pada perebutan dan pengklaiman terhadap hak milik, dan ini adalah masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pemerintahan, pemerintah hanya memberikan tapal batas dalam masalah administrasi agar proses pemerintah berjalan semestinya, karena wilayah konflik ini tercakup dalam wilayah administrasi pemerintahan Kuantan Singingi.

Hal yang sangat penting sekali adalah mengapa konflik ini terjadi karena ada lahan basah yang menjadi sumber konflik, perbedaan kepentingan dalam masalah tanah sering diikuti dengan penyerobotan hak-hak yang menimbulkan konflik terhadap pihak yang lemah (seperti masyarakat adat). Namun dibalik itu semua, terungkap pula bahwa faktor penguasaan sumber daya alam dan potensi uang yang dihasilkannya menjadi salah satu tujuan pokok yang berusaha diraih oleh faktor-faktor yang terlibat. Masyarakat mengharapkan royalty yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat.

Ahmad Subarjda dkk, menjelaskan konflik lingkungan biasanya adalah akibat dari adanya perbedaan persepsi diantara stakeholder dalam menilai potensi sumber daya alam dan standar kualitas lingkungan hidup, adanya perbedaan penilaian diantara stakeholder terhadap resiko dan dampak lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak seimbang.

Tabel V.4 : Tanggapan responden terhadap terjadinya konflik batas wilayah karena faktor politik

No	Faktor politik	SS	S	RR	TS	STS	Jlh
----	----------------	----	---	----	----	-----	-----

1.	Wilayah konflik akan mendirikan kecamatan.	14	-	10	24	4	52
2.	Konflik batas wilayah merupakan agenda perluasan wilayah.	18	10	-	20	4	52
3.	Konflik ini melibatkan elit politik.	-	28	-	16	8	52
4.	Konflik disebabkan oleh otonomi daerah.	12	28	-	12	-	52
5.	Otonomi daerah mempersempit peran orang adat.	16	-	-	24	12	52
6.	Uu otonomi daerah harus direvisi.	16	24	12	-	-	52
Jumlah		76	90	12	96	28	302
Rata-rata		12,66	15	2	16	4,66	52
Persentase (%)		24,34	28,84	3,84	30,76	8,96	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel V.4 diatas, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan dalam pendekatan faktor politik tanggapan responden terhadap penyebab terjadinya konflik dari segi politik 30,76% responden menyatakan tidak setuju karena konflik ini tidak murni berkembang dengan tujuan politik dan hanya ada sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa undang-undang otonomi daerah berusaha memperkecil ruang gerak masyarakat adat dengan tekanan politik pemerintahan lokal dan elit politik demi kepentingan pribadi.

Konflik tapal batas yang terjadi ada indikasi politik yang sangat kuat, diantaranya pengamatan penulis tentang kajian ini lebih banyak nuansa politiknya dari pada nuansa adat istiadatnya. Mengapa demikian, adanya konflik batas wilayah ini menjadi kuat dan meruncingnya karena ada indikasi ekonomi-politik, dorongan dan ransangan ingin mengharapkan fee dari perusahaan tersebut masyarakat ingin memperebutkannya, dan masyarakat menjadi terpacu karena pada batas wilayah yang dulu miliknya sudah menjadi lahan yang sangat menguntungkan bagi daerah yang mendapat lahan yang dari awal ada peminjaman wilayah untuk pemekaran kecamatan, hal ini dapat dilihat dari hasil tanggapan

responden dengan persentase 30,35% menyatakan setuju bahwa konflik batas wilayah ini ada indikasi politik dan kepentingan kelompok tertentu (*Data Wawancara Lapangan Kepala Desa 2011*).

Fenomena inilah konflik batas wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi hal penting karena adanya perluasan kekuasaan. Dari pandangan politik pemerintahan bahwa Kenegerian Kopah ingin membentuk kecamatan sendiri, sebaliknya pandangan adat istiadat, karena ada yang merasa kehilangan ulayat beberapa tahun yang silam. Ketegangan diantara kedua belah pihak tidak bisa lagi dibendung karena hak ulayat itu dimiliki oleh Kenegerian Kopah, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Nomor. 38/HGU/BPN/2005. tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Makanya masyarakat Kenegerian Kopah mengatakan hak ulayat adalah milik mereka karena wilayah perusahaan yang diberi HGU tersebut adalah diatas ulayat Kenegerioan Kopah. Rasionalnya keberadaan PT. Duta Palma Nusantara itu pada Tahun 1987 itu, segala administrasi dan surat serta izin berdiri di Kecamatan Benai karena peristiwa inilah konflik tidak akan pernah selesai.

Konflik akan berakhir dalam berbagai kemungkinan. Apabila kekuatan masing-masing pihak berimbang, maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila kekuatan yang tengah bentrok itu, tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominasi) oleh satu pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Konflik-konflik yang itu bisa berlangsung dalam skala kecil, akan tetapi pertentangan-pertentangan/konflik politik tidak sedikit pula terjadi dalam skala besar. Pertentangan politik adalah contoh yang lebih besar. Konflik politik seperti ini dapat melibatkan golongan-golongan dalam masyarakat, dan dapat pula melibatkan negara-negara yang berdaulat ini pun jarang mengakibatkan peperangan.

Hipotesis yang dinyatakan yaitu “Kerusuhan di berbagai kawasan di wilayah tanah air dalam persepsi berbagai kalangan masyarakat berhubungan dengan kesenjangan sosial ekonomi, ekonomi politik, serta tidak maksimalnya memerankan lembaga pelayanan sosial pemerintah, campur tangan aparat pemerintah dengan pihak keamanan yang memihak dalam penyelesaian masalah-masalah kehidupan dalam masyarakat dan di sisi lain keikutsertaannya dalam memicu kerusuhan itu sendiri.

Karena komponen masyarakat dan sumber daya alam merupakan faktor-faktor substantif dalam kehidupan, maka kedua komponen tersebut dikemas sebagai pemicu konflik hingga melahirkan kerusuhan.

Berdasarkan temuan lapangan umumnya terbukti. Konflik batas wilayah ini dinyatakan lebih pada perilaku yang kurang bisa menyesuaikan diri (*adjustment*) terhadap budaya dominan dalam keseharian maupun dalam upaya pemilikan (Lihat Bruner dalam Suparlan). Konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi lebih pada persaingan peluang menguasai lahan perusahaan yang menjadi dasar konflik sumber daya alam. Kenegerian Benai dan Kenegerian Kopah masalahnya tentang memperebutkan lahan pemilikan lahan perkebunan perusahaan, serta merebut peluang bisnis di satu sisi, keinginan untuk mensiasati kekuatan sesuatu di sisi lain, perebutan kekuasaan dari pihak Kopah. Dalam hal ini penulis mensinyalir posisi perusahaan sekarang menurut hemat penulis yang mengadu domba antara masyarakat.

Keterlambatan koordinasi dan penghimpunan pelbagai sumberdaya oleh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan hankam dalam mencegah perluasan konflik, menengarai kerusuhan yang sedang terjadi serta mengatasi dampak kerusuhan dari konflik. Terjadinya pemihakan aparat pemerintah dan keamanan yang sekerabat, dengan pihak-pihak yang

bertikai. Tidak kurang pentingnya adalah adanya data yang menunjukkan upaya orang-orang tertentu melalui komunikasi di tempat-tempat tertentu (kedai kopi, pasar, pertandingan, berbagai kesempatan pertemuan) meyakinkan masyarakat bahwa ada masalah yang tidak terselesaikan oleh pemerintahan.

Integrasi beresensi kohesi sosial tidak terjamin di lapangan penelitian karena: *pertama*, tidak diupayakan proporsi yang cukup dari setiap komponen aktor-aktor bisa bertindak sesuai dengan syarat-syarat keutuhan; *kedua*, Pembiaran pola-pola kebudayaan yang salah satunya gagal dalam menemukan suatu tata tertib yang minimal dan dengan permisif itu menimbulkan penyimpangan dan pertentangan.

Teori Malinowski tentang konflik akan terjadi jika dari berbagai pihak yang dipertemukan dalam satu wilayah kehidupan tidak dilandasi secara kuat oleh keuntungan timbal balik "*reciprocity*" dibawah prinsip-prinsip legal. Dari temuan menunjukkan kebenaran ini, karena prinsip reciprositas dan legalitas hampir tidak jelas fungsinya.

Berarti proposisi yang diiringi premis-premis pendukung teori Talcott Parson, Malinowski serta Edwar Bruner yang diperkuat Parsudi Suparlan, terbukti di wilayah penelitian sekalipun proporsinya tidak terlalu berimbang untuk setiap wilayah. Akan tetapi kelemahan teori-teori ini seolah-olah memperlihatkan kedinamisan ide dan aktivitas masing-masing masyarakat budaya di lokal saja secara horizontal dan vertikal yang menyulut konflik. Padahal di seluruh wilayah penelitian keadaan itu hanya bersifat laten dan labil. Sementara yang berperan adalah pihak provokasi politisi yang menyentuh wilayah pemerintahan dan keamanan, pihak luar baik masih dari dalam masyarakat sendiri maupun pihak diluar dari wilayah konflik.

Mengacu pada berbagai komponen tersebut di atas, data yang dihimpun peneliti menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah konflik umumnya masih memiliki modal sosial yang cukup memadai untuk mengelola konflik mereka. Data-data tersebut diperkuat oleh berbagai sikap masyarakat yang mencerminkan keterbukaan dan kesediaan mereka untuk lebih erat melakukan interaksi sosial dan budaya.

Bagi sebahagian besar penduduk asli dan pendatang masih menunjukkan kemauan hidup bersama secara damai seperti semula. Memiliki renungan yang relatif sama, mengapa bisa terbawa arus saling bermusuhan dan berperang sesama sekampung yang sebelumnya bergandengan tangan dalam menjalankan kehidupan sekalipun berbeda etnis dan agama serta berlebih kurang tingkat rezeki.

Berarti ada modal dari segi kesadaran *kohesi* sosial, membenci orang atau kelompok yang telah memprovokasi (*menghindari konflik* baru), dan implisit keinginan membangun *tatanan sosial baru* dari puing keruntuhan.

Dengan sikap yang sedemikian sesungguhnya dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah konflik umumnya masih memiliki modal sosial yang cukup memadai untuk dapat menyatukan mereka kembali dalam kehidupan yang guyub dan rukun. Khususnya masyarakat Kenegerian Kopah dan Masyarakat Kenegerian Benai.

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal, konflik politik itu mencakup kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal, yang dimaksud dengan kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama dan cendikiawan dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

Kemajemukan horizontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain, dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Kemajemukan horizontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Kelompok masyarakat yang tinggal di kota, misalnya menghendaki harga beras dan bahan bakar minyak dikendalikan oleh pemerintah dan kalau perlu disubsidi oleh pemerintah, sedangkan masyarakat yang tinggal di desa menghendaki agar pemerintah membiarkan harga-harga beras dan bahan bakar minyak berkembang sesuai dengan mekanisme pasar. Sebaliknya pemerintah hanya berperan dalam menciptakan dan menegakkan aturan main yang adil.

Kemajemukan vertikal ialah struktural masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut, jadi distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan politik. Hal ini disebabkan adanya fakta terdapat sejumlah masyarakat yang menerima perbedaan tersebut. Perbedaan-perbedaan masyarakat ini baru menimbulkan konflik, apabila kelompok tersebut memperebutkan sumber daya yang sama, seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan dan kehormatan.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh “ titik kemarahan” pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (*sufficient condition*) untuk menimbulkan politik.

Tabel V.5 : Tanggapan responden terhadap terjadinya konflik batas wilayah karena faktor adat

No	Faktor adat	SS	S	RR	TS	STS	Jumlah
1.	Konflik wilayah ini konflik tanah ulayat.	12	10	6	24	-	52
2.	Tanah ulayat sudah di undang-undangkan pemerintah.	-	26		26	-	52
3.	Pemerintah menyelesaikan konflik ini.	14	20	9	9	-	52
4.	Tanah ulayat diundang-undangkan.	14	19	-	19	-	52
5.	Tanah ulayat yang bermasalah diselesaikan dengan undang-undang.	-	38	-	14	-	52
6.	Tanah ulayat diurus oleh pemerintah.	-	24	-	16	12	52
7.	Tanah ulayat dikuansing diundang-undangkan.	-	26	-	26	-	52
8.	Tanah ulayat milik kenegerian kopah.	23	-	-	13	16	52
9	Tanah ulayat ini milik kenegerian benai.	18	-	-	16	18	52
Jumlah		81	136	15	163	46	441
Rata-rata		9	15,11	1,66	18,11	5,11	52
Persentase (%)		17,30	29,05	3,19	34,82	9,82	100

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel V.5 diatas, dapat dilihat bahwa konflik batas wilayah ini murni ditimbulkan oleh masalah adat dan nilai-nilai luhur daerah yang berkonflik ini terbukti dari tanggapan responden yang menyatakan setuju dengan porsentase 29,05 % dari responden tersebut mengatakan konflik murni disebabkan oleh pertenangan adat dan kepemilikan tanah ulayat,

karena persepsi masing-masing masyarakat yang berkonflik berbeda makanya sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa konflik ini adalah konflik adat.

Konflik batas wilayah yang terjadi disebabkan oleh konflik adat, dimana masyarakat adat tidak mendapatkan hak-haknya atas kepemilikan tanah ulayat, sehingga lahan yang menyebabkan konflik itu menjadi pertarungan hidup dan matinya masyarakat adat, karena mereka telah menjadi korban globalisasi, kolonialisme, serta imperialisme global. Pemerintah sebagai pemegang puncak kekuasaan kadangkala memberikan potensi ini terjadi, karena adanya kesepakatan penanaman modal asing yang masuk ke daerah. Maka dalam pada itu masyarakat adat yang terkorbankan, dengan adanya kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, sehingga masyarakat adat menjadi korban kebrutalan pemerintah, yang pada sisi lain masyarakat adat berhadapan langsung dengan konflik adat itu sendiri.

Masyarakat adat yang bersengketa, memperebutkan tanah ulayat secara adat. Dengan tidak langsung antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri yang bersengketa diatas kepemilikan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Jadi ini adalah konflik yang membentuk sebuah lingkaran dimana masyarakat adat pada tataran tertentu akan diadu dan dibentrokkan dalam satu kepentingan yang sama, yakni kepemilikan terhadap tanah ulayat dan memperebutkan hak dan milik mereka bersama-sama.

Disamping indikasi pelegitimasi tapal batas, ekonomi, politik, dalam perjalanannya konflik ini membuka relung konflik yang sangat pelik sekali dan sangat sukar untuk diselesaikan, yakni konflik adat.

Nilai-nilai budaya yang luhur adalah sebagai sistem nilai memang seharusnya ditempatkan pada tataran yang ideal dan tinggi untuk mampu membangun keamanan dan stabilitas masyarakat. Namun demikian bukan berarti masyarakat adat harus mengisolasi diri dari pengaruh luar, karena "sejarah dan ilmu antropologi memperlihatkan bahwa tidak

ada satu kebudayaanpun di dunia ini yang bisa berkembang subur dengan isolasionisme. Kebudayaan suatu bangsa, senantiasa adalah kebudayaan campuran (*metisage*)", ujar L. Lenghor, mantan Presiden Senegal. Oleh karena itu masyarakat adatpun harus bersifat terbuka karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain dalam menghadapi era globalisasi.

Masyarakat berharap implementasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat menampung dinamika masyarakat lokal dan mampu mengakomodasikan keanekaragaman struktur dan kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat tidak lagi berdiri di atas kekuasaan adat istiadat yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik batas wilayah sekiranya dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang ada disekitar wilayah konflik.

Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya Lembaga Adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, berikut ini penulis kutip rumusan dari Permendagri No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengem-bangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah

Dari Permendagri No.3 Tahun 1997 di atas jelaslah bahwa fungsi yang ada pada lembaga adat menampung aspirasi masyarakat yang ada di wilayah adat istiadat, memberdayakan dan melestarikan adat istiadat, menciptakan hubungan harmonis antar masyarakat adat. Ketiga fungsi tersebut lembaga adat dalam penyelesaian konflik ini ada dalam satu persepsi yang sama dalam menyelesaikan konflik, tidak ada kepentingan yang dikedepankan.

5.3. Implikasi Konflik Batas Wilayah Terhadap Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah dengan Kecamatan Benai.

Kajian ini meneliti ruang lingkup konflik batas wilayah sumber daya alam (SDA) yang bernuansa ekonomi-politik. Bagian yang penting sekali adalah pengantar teori-teori konflik serta kajian mengenai resolusi konflik untuk menjelaskan konflik yang berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi. Pembahasan teori konflik ini penting untuk memahami sifat konflik politik itu sendiri. Untuk menemukan pemecahannya (solusi) terhadap masalah-masalah yang nampaknya tak kunjung hilang dari berbagai belahan dunia itu, wilayah teoritis ini perlu dibahas secara mendalam. Pengembangan-pengembangan dalam bidang ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peneliti untuk lebih memahami dan membantu mencari pemecahannya. Proses ini mempunyai tiga tujuan: Pertama, salah satu cara untuk menemukan penjelasan yang layak terhadap sifat konflik; kedua, menggunakan model ini

untuk menjelaskan konflik dalam konteks yang lebih khusus, dan ketiga, mencari berbagai jalan pemecahannya.

Implikasi konflik tapal batas yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ada beberapa hal, sebagai penguatan legalitas pemerintahan konflik itu berkembang antara kebijakan ekonomi-politik.

Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan daerah yang tergantung kepada kepala daerah beserta staffnya dalam menggerakkan peralatan se-efisien dan se-efektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan undang-undang.

Organisasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi dapat dengan berjalan sebaik-baiknya juga harus berpedoman pada penerapan prinsip-prinsip organisasi. Terselenggaranya otonomi daerah adalah salah satu tujuan dari organisasi pemerintahan yang dicita-citakan dalam undang-undang Otonomi Daerah.

Perjalanan konflik batas wilayah yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah sebuah implikasi politik yang berbasis ekonomi, atau disebut dengan ekonomi-politik. Setiap arah dan kebijakan pemerintah daerah yang dikeluarkan harus mempertimbangkan aspek ekonomis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang bersengketa/ berkonflik.

Pada tataran konflik batas wilayah ini ada beberapa langkah nyata yang dilakukan. Penulis memberikan amatan yang jelas diantaranya adalah, *pertama*, rekonsiliasi adalah suatu proses penyelesaian masalah konflik tapal batas ini pihak-pihak yang bersengketa dengan musyawarah, rapat adat, bertemunya kedua belah pihak. Cara ini sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak ketiga atau pihak penengah dalam masalah ini, sudah beberapa kali diadakan rekonsiliasi dan bahkan sampai lembaga legislatif. *Kedua*, Mediasi adalah pihak ketiga dengan melakukan pertemuan dengan memfasilitasi masyarakat yang sedang

bersengketa, ini ada beberapa lembaga yang memfasilitasi sebagai mediasi dari penyelesaian konflik batas wilayah ini, seperti eksekutif dan legislatif. Dan cara yang ini pun sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah konflik batas wilayah ini. *Keriga*. Arbitrase ialah salah satu jalan hukum yang harus ditempuh apabila konflik ini sampai kepada pengadilan dan disidangkan, untuk tahap penyelesaian ini konflik yang berkembang di Kabupaten Kuantan Singingi tidak menempuh jalur hukum, cukup pada tataran rekonsiliasi dan mediasi saja.

Hubungan kedua sistem itu, terletak pada penggunaan “kekuasaan pemaksa secara sah” didalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misalnya didalam perencanaan dan pengerahan masyarakat kepada pusat-pusat ekonomi yang biasa disebut sebagai pembangunan, merupakan contoh dari hubungan yang erat sekali diantara politik dan ekonomi. Intensitas hubungan kedua aspek diatas, adalah berbeda diberbagai negara. Akan tetapi di Indonesia, seperti juga di negara-negara berkembang pada umumnya; hubungan antara politik dan ekonomi jelas sekali. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu, *Pertama*, sebagai negara yang baru lepas dari sistem ekonomi kolonial dimana sistem ekonomi kolonial merupakan sistem ekonomi terpecah dimana dua unsur yaitu unsur ekonomi ekspor. *Kedua*, sebagai akibat dari sistem ekonomi penjajahan dimana masyarakat terkesan amat lemah. *Ketiga*, daya saing kelompok ekonomi tradisional yang sangat lemah. *Keempat*, secara nasional kelompok ekonomi yang ada didalam masyarakat Indonesia belum mampu untuk melihat diri sendiri sebagai unit politik yang didasarkan pada unsur primordisi dari pada kapasitas ekonomi antara daerah ekonomi, amat berpengaruh kepada hubungan antara daerah serta hubungan pusat dan daerah sebagai kesatuan ekonomi.

Penerjemahan Otonomi Daerah dalam bentuk kongkrit juga digambarkan sebagaimana dalam implementasi undang-undang No.22 Tahun 1999 dan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, serta undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan daerah antara pemerintah Pusat dan Daerah. Adalah pemerintahan daerah bisa menjalankan amanat undang-undang tersebut, sebagai bentuk perpanjangan undang-undang dalam proses penyelesaian masalah konflik di daerah amat relevan sekali dengan apa yang dicita-cita otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi dewasa dalam penanganan konflik yang terjadi di daerahnya masing-masing. Disisi lain masalah lokal tersebut adalah masalah pemerintah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

Eksistensi kebijakan Otonomi Daerah kiranya sangat penting dipahami sebagai bagian dari agenda demokratisasi kehidupan bangsa. Dengan kata lain keberadaan kebijakan Otonomi Daerah tidak boleh dipandang sebagai *a final destination* melainkan lebih sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan rumusan dan tujuan Otonomi Daerah semacam ini, keberadaan kebijakan Otonomi Daerah akan mampu menciptakan sistem pemerintah yang demokratis. Argumen dasarnya adalah, dengan konsep tersebut diasumsikan masyarakat akan memiliki akses yang lebih besar dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sementara itu disisi lain, pemerintah daerah sendiri akan lebih responsif terhadap berbagai tuntutan yang datang dari berbagai komunitasnya. Dengan demikian, agenda demokratisasi merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah apabila keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat daerah menjadi target pencapaian.

Sebagai bagian dari agenda demokratisasi, Otonomi Daerah mensyaratkan pula adanya perubahan struktur perwakilan politik, berlakunya akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Karena itu, otonomi daerah sebagai paradigma baru mengharuskan perubahan struktur lembaga kenegaraan, sistem pemilu, restrukturisasi lembaga peradilan, dan perubahan birokrasi patrimonial yang mengabdikan pada kekuasaan menjadi birokrasi rasional yang melayani kepentingan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari kajian diatas penulis dapat memberikan kesimpulan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisa dan amatan dilapanagan dapat sebuah kesimpulan yang bisa diambil diantaranya adalah bahwa penelitian ini mengindentifikasikan ada beberapa variabel penting. Pertama, Masalah politik, karena adanya kepentingan yang menjadi fokus kajian ini, yaitu diantara wilayah yang berkonflik ingin memperluas wilayah karena ada indikasi ingin membentuk kecamatan defenitif. Juga kepentingan organisasi, institusi politik untuk mencari keuntungan dalam mengembangkan popularitas dalam catur perpolitikan lokal. Kedua, masalah ekonomi, Hal yang sangat penting sekali adalah mengapa konflik ini terjadi karena ada lahan basah yang menjadi sumber konflik, perbedaan kepentingan dalam masalah tanah sering diikuti dengan penyerobotan hak-hak yang menimbulkan konflik terhadap pihak yang lemah (seperti masyarakat adat). Namun dibalik itu semua, terungkap pula bahwa faktor penguasaan sumber daya alam dan potensi uang yang dihasilkannya menjadi salah satu tujuan pokok yang berusaha diraih oleh faktor-faktor yang terlibat. Masyarakat mengharapkan royalty yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dalam artian fee.
2. Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi penanganan konflik batas wilayah yang d⁷⁷an oleh sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Kuantan Singingi lebih difokuskan pada penanganan masalah adat, karena masalah konflik batas wilayah di Kuantan Singingi lebih bersifat klasik, penyelesaian konflik

secara administrasi pemerintahan sudah final dan tidak ada masalah lagi, seyogyanya telah disebutkan diatas masalah ini sampai menemui jalan buntu karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan konflik pada ranah adat, pemerintah daerah pun sudah memberikan ruang dan memfasilitasi masalah ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan nomor. 100/PUM/1681 tentang batas administrasi pemerintahan antara Kecamatan Benai dengan Kecamatan Kuantan Tengah. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara seksama hasil evaluasi otonomi daerah selama empat tahun terakhir. Bila gagal dalam mengakomodasi aspirasi dan tuntutan untuk perbaikan otonomi daerah berdasarkan aspirasi lokal dan pluralitas lokal, hanya akan menuai konflik baru di daerah. Upaya lainnya yang perlu dilakukan ke depan dan ini yang mungkin lebih penting adalah menyusun konsep tentang pengelolaan kewenangan antar daerah yang tidak membingungkan daerah. Artinya, diperlukan penyusunan konsep baru yang mengedepankan konsep “bio-region”, yaitu pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang didasarkan atas batas-batas wilayah ekologis dan tidak semata-mata wilayah administratif.

1.2. Saran

Adapun hasil dari kajian yang di bahas di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian konflik di tingkat bawah (akar rumput) harus membuka diri dan memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat yang bertikai, sebaliknya Pemerintah Daerah memberikan pemahaman bagaimana masyarakat adat memahami keberadaan wilayah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi baik secara administrasi pemerintahan maupaun dalam

ranah pemahaman tentang ulayat, hutan lindung, rimba larangan, dan masalah-masalah yang menyangkut tentang pertanahan apalagi masyarakat tidak cukup ilmu untuk mencerna tentang kasus dan konflik tersebut.

2. Pemerintah Daerah harus menghindari penandatanganan MOU / bentuk kerjasama dengan pihak swasta, investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Kuantan Singingi di wilayah yang kira-kira potensi konfliknya lebih besar, serta mengurangi timbulnya masalah dengan masyarakat adat, karena pada situasi tersendiri masyarakat adat sulit diberikan pemahaman tentang masalah administrasi pemerintahan, termasuk sumberdaya masyarakat adat masih minim / kurang memahami masalah pemerintah.
3. Pemerintah Daerah harus bisa menyelesaikan masalah konflik ini dengan pendekatan sektoral terhadap sumber daya alam harus diakhiri. Kawasan hutan lindung, rimba larangan, tanah ulayat, pertambangan, masalah tanah, air, misalnya tidak boleh dipecah dengan semena-mena menurut sektor/ departemen ataupun batas wilayah administratif. Kawasan dengan masyarakat dan budayanya harus dilihat sebagai satu kesatuan ekologi dan bioregion.
4. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta masyarakat (LSM, dan organisasi yang terkonsentrasi tentang masyarakat adat) secara bersama mengidentifikasi wilayah-wilayah bioregion, bagaimana pengelolaannya (pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab/termasuk pengelolaan dampak residualnya dan bagaimana *revenue sharig*/ bagi hasil).
5. Partnership dalam pengelolaan bioregion harus melibatkan komunitas lokal, pemerintah pusat dan daerah, serta swasta.
6. Konsorsium yang ada di daerah Kabupaten/Kota perlu dibentuk untuk mengelola SDA yang bersifat lintas daerah, lintas provinsi, serta lintas Negara. Misalnya daerah

perbatasan yang mengandung sumber daya alam yang melimpah, serta wilayah aliran sungai.

7. Semua ketentuan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada provinsi untuk mengambil alih wewenang yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, harus dicabut. Provinsi cukup melakukan supervisi sesuai dengan tugasnya mewakili pusat dalam mengawasi daerah-daerah dilingkungannya.
8. Setiap kawasan bioregion memerlukan pranata (aturan main dan institusi-institusi yang mendukung serta melibatkan stakeholders, pusat-daerah-swasta/pengusaha serta komunitas lokal seperti, masyarakat adat).
9. Pemerintah daerah, masyarakat harus bisa mengubah konflik menjadi kerjasama.
10. Diharapkan kepada Kabupaten/Kota untuk memperkuat kerjasama antar daerah dengan membentuk semacam konsorsium untuk mengelolah urusan-urusan yang bersifat lintas Kabupaten/kota. Artinya mereka menolak pemerintah provinsi untuk secara otomatis mengambil alih urusan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana UU No. 32/2004, dalam menyikapi masalah ini sebaiknya pemerintahan provinsi memfasilitasi, bukan mengintervensi usaha-usaha kerjasama beberapa kabupaten/kota dalam wilayahnya.
11. Pendekatan top-down pemerintah provinsi terhadap pemerintahan kabupaten/kota harus segera di tinggalkan karena tidak cocok lagi.
12. Otonomi daerah seharusnya mampu meminimalisasi konflik dan sebaliknya meningkatkan kerjasama.
13. Partnerships/ Kemitraan perlu diupayakan dan dikembangkan secara sehat.

14. UU No. 32/2004 yang beraroma resentralisasi (*recentralisation flavour*) itu adalah sebuah kemunduran (*set back*) demokratisasi pemerintahan lokal di Indonesia dan perlu direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

- AE Priyono, Willy Purna Samadhi, Olle Tornquist, dkk., *Menjadikan Demokrasi Bermakna Masalah Dan Pilihan*, Cet kedua (edisi revisi) Demos Jakarta.2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke. 12
- Direktorat Pembatasan PUM., *Kebijakan Umum Batas Daerah*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2002.
- Hamidy, UU., *Kamus Antropologi Dialek Melayu Rantau Kuantan Riau Pekanbaru*, UNRI, Press, 1995.
- Halkis, *Revitalisasi Hak Ulayat Tantangan atau Peluang*, Pekanbaru, 2006.
- HAW. Widjaja., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Ed. I. Cet. I. Jakarta: Pt Raja Garfindo Persada, 2002.
- Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kaho, Josef Riwu., *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Kartono, Kartini., *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, ed.2 cet.10, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Narwoko, J. Dwi. - Bagong Suyanto (ed)., *Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan*, edisi 2. cet. 2, Jakarta, Kencana. 2006.
- Pruit, Dean G & Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial* (terjemahan), Pustaka Pelajar, 2004.
- Rauf, Maswadi., Jurnal. *Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Universitas Riau, Vol. 1/No.1/Juni/2003.
- Ratnawati, Tri, Jurnal., *Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Universitas Riau, Vol. 1/Juni/2005.

- Riva'I, Veith Zal., *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ritzer George - Douglas J. Goodman., *Teori Sosiologi Modern*, Ed. Enam, Kencana. Jakarta, 2002.
- Sanit, Arbi., *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sani, Abdul., *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Soelaiman. M. Moenandar., *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, editor. Aep Gunarsa, SH. Cet. 10. PT. Refika Aditama, Bandung. 2001.
- Soekanto, Soejono, Lestari, Ratih., *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosial*. Cet.1. Sinar Grafindo, Jakarta, 1998.

Peraturan Pemerintah Dan Perundang-undangan

- PP. No. 33/1995., Tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hilir Hulu, dan Kampar dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006., Tentang Penegasan Batas Wilayah, Jakarta, 2006.
- Surat Keputusan BPN, No. 38/HGU/BPN/2005., Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
- UU. No. 22 Tahun 1999., Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafindo, Jakarta.